

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI / Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui ijin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. (Sudarsono, 2007, hal.34).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Bassar (2004) yang melakukan penelitian mengenai kinerja penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank syariah sesudah kebijakan perbankan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Hasil penelitian Bassar (2004), menunjukkan bahwa kinerja penghimpunan dan penyaluran dana sesudah kebijakan perbankan tahun 1998 mengalami peningkatan yang lebih baik dari sebelum adanya kebijakan perbankan tahun 1998 tersebut.

Selain Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tersebut, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 4 / I / PBI / 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka terjadi peningkatan jumlah bank yang melaksanakan prinsip syariah yang cukup signifikan khususnya dalam pembentukan Unit Usaha Syariah. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah jaringan kantor Unit Usaha Syariah pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Unit Usaha Syariah

Jaringan Kantor UUS	2002	2003	2004	2005	2006	2007
KP/UUS	6	8	15	19	20	25
KPO/KC	25	42	56	86	97	109
KCP	0	6	18	48	59	55
KK	0	0	0	1	6	6

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2002 dan 2007

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, jumlah bank konvensional yang memiliki Kantor Pusat (KP)/ Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2002 berjumlah 6 unit menjadi 25 unit pada tahun 2007, jumlah Kantor Pusat Operasional (KPO)/ Kantor Cabang (KC) UUS pada tahun 2002 berjumlah 25 unit menjadi 109 unit pada tahun 2007. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya Peraturan Bank Indonesia No. 4/ I/ PBI / 2002, yang diterbitkan 2002 memberikan pengaruh yang cukup signifikan dengan ditandai adanya peningkatan jumlah bank konvensional yang memiliki jaringan kantor UUS pada tahun 2007 hanya berselang 5 (lima) tahun setelah peraturan tersebut diterbitkan.

Oleh karena jumlah jaringan kantor UUS lebih banyak daripada Bank Umum Syariah (BUS), maka penelitian ini lebih memfokuskan pada Unit Usaha Syariah. Namun oleh karena UUS yang dibentuk dari bank konvensional beragam, ada yang berasal dari Bank Umum Pemerintah Nasional, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Asing, maka penelitian ini memperkecil sampel penelitian ini menjadi UUS dari Bank Umum Pemerintah Nasional dan Bank Umum Swasta Nasional.

Selain adanya peningkatan dalam jumlah kantor yang beroperasi, juga terdapat peningkatan dalam total asset yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah tersebut. Peningkatan total asset tersebut dapat terlihat dari tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Total Asset UUS (Jutaan Rp)

UUS	2005	2006	2007
UUS BUPN			
BNI	5.092.205	5.671.916	8.108.166
BRI	2.106.137	3.717.637	4.627.976
BTN	291.662	1.311.550	2.428.096
Total	7.490.004	10.701.103	15.164.238
UUS BUSN			
IFI	147.430	131.515	179.272
Danamon	1.192.848	1.502.406	2.584.085
Bukopin	1.225.878	1.579.640	1.997.329
BII	620.839	587.849	1.028.893
Niaga	831.882	1.804.214	2.838.875
Permata	313.082	1.010.379	1.816.490
Total	4.331.959	6.616.003	10.444.944

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi, 2005 - 2007

Dari tabel 1.2 tersebut terlihat perkembangan total asset Unit Usaha Syariah BUPN dan BUSN selama periode 2005 – 2007. Dari tahun 2005 sampai tahun 2007, total asset UUS BUPN terus mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada UUS BUSN.

Adanya peningkatan dalam total asset UUS BUPN dan UUS BUSN dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, harus sesuai dengan tahap implementasi dan prioritas-prioritas yang diungkapkan dalam cetak biru perkembangan perbankan syariah oleh Bank Indonesia. Tahap implementasi dan prioritas inisiatif-inisiatif dalam pengembangan perbankan syariah dibagi oleh Bank Indonesia menjadi tiga tahap, yaitu, *Pertama* Tahap I periode 2002-2004 meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan, *Kedua* Tahap II periode 2004-2008 memperkuat struktur industri perbankan syariah, *Ketiga* Tahap III periode 2008-2011 memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional. Tahap implementasi dan prioritas inisiatif-inisiatif pengembangan perbankan syariah terlihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.3

Tahap Implementasi dan Prioritas Inisiatif-inisiatif

	Meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan	Memperkuat struktur industri perbankan syariah	Memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional
	Tahap I (2002-2004)	Tahap II (2004-2008)	Tahap III (2008-2011)
Kepatuhan kepada prinsip syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman konsep keuangan syariah • Menyusun norma-norma keuangan syariah • Melakukan kajian tentang mekanisme dan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peningkatan efektifitas pengawasan • Mengembangkan konsep insentif kepatuhan pada prinsip syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan konsep rating yang terintegrasi antara sisi syariah dan keuangan
Ketentuan kehati-hatian	<ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan ketentuan kehati-hatian dan <i>good corporate governance</i> berdasarkan karakteristik operasional bank syariah • Menyempurnakan ketentuan jaringan kantor • Mengkaji mekanisme umpan balik dalam disain pengaturan dan pengawasan • Mengkaji penerapan <i>real-time supervision</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko • Mengembangkan konsep pengaturan bagi kebijakan <i>exit</i> dan <i>entry</i> • Menerapkan <i>real-time supervision</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong terciptanya <i>selfregulatory system</i>
Efisiensi operasi dan daya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong tercapainya <i>economies of scale</i> dan <i>economies of scope</i> • Meningkatkan kualitas SDI • Melakukan kerjasama dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong aliansi strategis • Mewujudkan kerjasama bagi pembinaan dengan lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Menodorong terciptanya pemain berskala global dan berdaya saing internasional

Lanjutan	Meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan	Memperkuat struktur industri perbankan syariah	Memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional
	Tahap I (2002-2004)	Tahap II (2004-2008)	Tahap III (2008-2011)
	lembaga terkait <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peningkatan efektivitas fungsi dan peran arbitrase syariah 		
Kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung terbentuknya forum komunikasi pengembangan perbankan syariah • Melakukan kajian awal mengenai potensi <i>systemic cost</i> • Melakukan kajian tentang penerapan dan manfaat konsep bagi hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong aktifnya forum informasi dan kajian perbankan syariah • Mendorong terlibatnya lembaga rating dalam kegiatan perbankan • Menyusun konsep deposit takaful yang dapat meminimalkan potensi <i>systematic cost</i> • Melakukan kajian <i>voluntary sector</i> • Mendorong peningkatan peranan pembiayaan bagi hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong terwujudnya konsep operasi perbankan/ keuangan syariah yang terintegrasi (<i>kaffah</i>)

Sumber : Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah, 2002

Selain menerbitkan cetak biru pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia juga menerbitkan program akselerasi pengembangan perbankan syariah pada tahun 2007. Tujuan dari program akselerasi pengembangan perbankan syariah tersebut adalah untuk mencapai share perbankan syariah sebesar 5% pada akhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dianalisa kinerja Unit Usaha Syariah tersebut yang diukur dari efisiensi. Secara umum penelitian tentang efisiensi bank Islam mempunyai manfaat paling tidak karena 3 alasan (Molyneux, 2003) (dalam Heralina, hal. 10, 2005).

1. Peningkatan efisiensi biaya berarti pencapaian laba yang lebih tinggi dan memperbesar peluang untuk bertahan di pasar yang kompetitif. Hal ini penting bagi dunia perbankan Islam karena di pasar keuangan ini berhadapan langsung dengan lembaga keuangan konvensional.
2. Nasabah akan tertarik kepada harga yang lebih baik dan pelayanan yang berkualitas yang tentunya dihasilkan oleh operasional bank yang efisien.
3. Kesadaran akan hal-hal yang berhubungan dengan efisiensi akan memudahkan pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan dunia perbankan sebagai suatu keseluruhan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka untuk menilai performance suatu bank salah satunya adalah dengan mengukur efisiensi bank. Penelitian mengenai efisiensi perbankan syariah di Indonesia, baik menggunakan metode parametrik dan non parametrik belum banyak dilakukan. Selama ini untuk mengevaluasi efisiensi operasional perbankan Islam di Indonesia, alat ukur yang biasa digunakan adalah rasio keuangan yaitu Biaya Operasional Pendapatan Operasional.

Perhitungan rasio keuangan sangat mudah diperoleh, berasal dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Konsep rasio keuangan menilai bahwa bank akan lebih efisien jika dapat menurunkan biaya operasionalnya. Namun, pengukuran efisiensi berdasarkan rasio keuangan memiliki kelemahan karena rasio keuangan seringkali sangat sulit diinterpretasi. Informasi yang diperoleh dari rasio keuangan dapat misleading. Pemotongan biaya tidak selalu berarti efisien. Pemotongan biaya seringkali berdampak pada kualitas produk dan jasa yang selanjutnya berdampak kepada pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalahnya adalah Unit Usaha Syariah baik dari Bank Umum Pemerintah Nasional maupun dari Bank Umum Swasta Nasional terus mengalami peningkatan total asset, sementara perkembangan tersebut harus sesuai dengan cetak biru perkembangan bank syariah, dimana bank syariah diharapkan juga mampu meningkatkan efisiensi, namun metode pengukuran efisiensi yang biasa digunakan (rasio keuangan)

seringkali sangat sulit diinterpretasi dan terkadang informasi yang diperoleh misleading sehingga memerlukan adanya metode alternatif yang lebih baik untuk mengukur efisiensi tersebut.

Konsep yang ditawarkan sebagai alternatif adalah suatu metode pengukuran efisiensi profit. Efisiensi profit dirumuskan sebagai hubungan antara profit, harga input dan kuantitas output. Efisiensi profit terjadi jika perusahaan mendapatkan profit optimum yang merupakan hasil dari produksi pada tingkat kuantitas output tertentu dari beberapa harga input. Efisiensi profit tersebut merupakan efisiensi alternatif profit yang menurut Berger dan Mester (1997) lebih baik dari efisiensi standard profit.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional dengan metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) derivasi fungsi profit dan BOPO?
2. Apakah terdapat perbedaan efisiensi antara Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional dan Bank Umum Swasta Nasional periode 2005-2007 dengan metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) derivasi fungsi profit?
3. Apakah terdapat perbedaan efisiensi antara Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional dan Bank Umum Swasta Nasional periode 2005-2007 dengan metode BOPO?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka dalam tesis ini tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuran efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional dengan metode SFA derivasi fungsi profit dan BOPO

2. Melakukan analisis apakah terdapat perbedaan efisiensi antara Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional dan Bank Umum Swasta Nasional periode 2005-2007 dengan metode SFA
3. Melakukan analisis apakah terdapat perbedaan efisiensi antara Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional dan Bank Umum Swasta Nasional periode 2005-2007 dengan BOPO

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan dan pembuat kebijakan mengenai pengukuran efisiensi dalam perbankan syariah. Pengambil kebijakan tersebut adalah pihak manajemen bank dan pembuat kebijakan adalah Bank Indonesia. Dengan penelitian ini pengukuran efisiensi perbankan yang sudah ada saat ini dapat terus dikembangkan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dapat menjelaskan teori yang sudah dipelajari diaplikasikan pada perbankan syariah.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam tesis ini tidak terlalu luas dan fokus maka dalam tesis ini masalah akan dibatasi untuk hal berikut :

- a. Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data kuartal dari Maret 2005 sampai Desember 2007.
- b. Data bank yang akan digunakan adalah 3 Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional yaitu PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara, serta 6 Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Swasta Nasional yaitu PT. Bank IFI, PT. Bank Danamon, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Internasional Indonesia, PT. Bank Niaga, dan Bank Permata.
- c. Pengukuran efisiensi difokuskan pada pendekatan intermediasi dan dari sisi profit, sehingga pendekatan operasional dan asset tidak diperhitungkan, karena penelitian ini hanya melakukan pengukuran efisiensi Unit Usaha Syariah dengan pendekatan intermediasi.

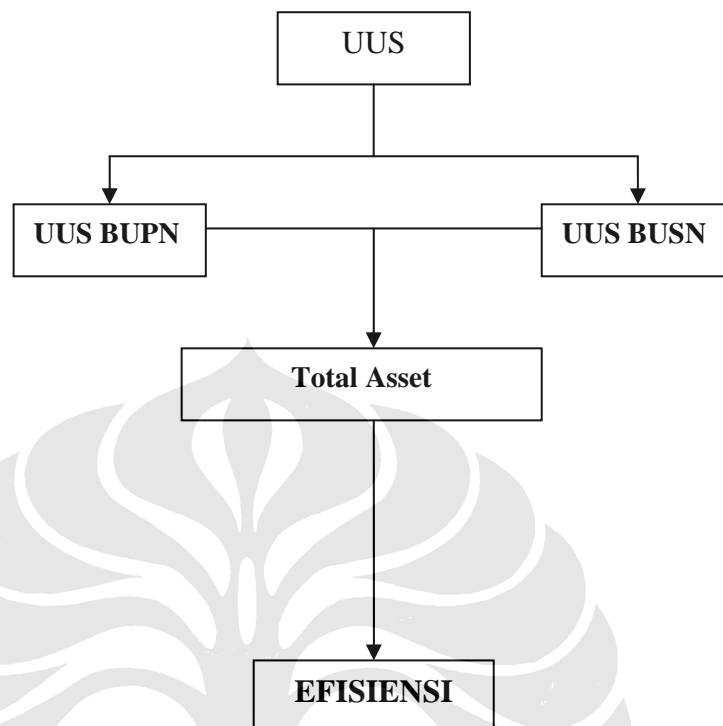
1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi Unit Usaha Syariah dan melakukan perbandingan skor efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Swasta Nasional.

Penelitian ini dimulai dengan membagi Unit Usaha Syariah menjadi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Swasta Nasional. Kemudian dilihat indikator perkembangannya yaitu total asset. Berdasarkan data laporan keuangan publikasi dari Maret 2005 sampai Desember 2007, total asset UUS BUPN dan UUS BUSN terus mengalami peningkatan. Peningkatan total asset tersebut harus juga sesuai dengan *blue print* perkembangan perbankan syariah yaitu adanya peningkatan efisiensi.

Sementara pengukuran efisiensi yang sudah diterapkan perbankan syariah adalah rasio keuangan BOPO, yang mana hasil pengukuran BOPO tersebut seringkali sangat sulit diinterpretasi. Sehingga penelitian ini mengukur efisiensi UUS BUPN dan UUS BUSN dengan menggunakan metode alternatif yaitu *Stochastic Frontier Analysis (SFA)* derivasi fungsi profit dan membandingkan skor efisiensi UUS BUPN dengan UUS BUSN dengan melakukan uji hipotesis menggunakan uji *mean 2 sample*.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya untuk mengetahui efisiensi antara Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional dan dari Bank Umum Swasta Nasional dari metode SFA derivasi fungsi profit dan BOPO, maka dalam hipotesis disusun pernyataan untuk membandingkan efisiensi masing-masing Unit Usaha Syariah.

a. Metode SFA derivasi fungsi profit dengan penekanan intermediasi

H₀ : Rata-rata nilai efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional tidak berbeda dengan rata-rata nilai efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Swasta Nasional

H₁ : Rata-rata nilai efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah

Nasional berbeda dengan rata-rata nilai efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Swasta Nasional.

b. Metode rasio keuangan BOPO

H0 : Rata-rata nilai efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional tidak berbeda dengan rata-rata nilai efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Swasta Nasional

H1 : Rata-rata nilai efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional berbeda dengan rata-rata nilai efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Swasta Nasional.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji mean 2 sample.

Hipotesis tersebut berdasarkan penelitian Astuti (2004), bahwa berdasarkan struktur kepemilikan bank, terdapat perbedaan efisiensi antara bank persero atau bank umum pemerintah nasional dengan bank umum swasta nasional. Penelitian Jahja (1993) mengungkapkan bahwa rata-rata *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Pemerintah sejak tahun 1988 hingga 1992 pasca pakto 1988 berdasarkan uji hipotesisnya selalu diatas Bank Umum Swasta Nasional. Dua penelitian tersebut menggunakan data dari bank konvensional, maka dalam penelitian ini akan dibuktikan hasil yang telah didapat dari bank konvensional dengan Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh masing-masing dari bank konvensional tersebut.

1.7 Metode Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan dihasilkan tujuan penelitian dan kemudian muncullah dugaan penelitian yang dijadikan hipotesis penelitian. Hipotesis disusun dengan pernyataan untuk membandingkan nilai efisiensi Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Pemerintah Nasional dan Bank Umum Swasta Nasional untuk pendekatan SFA *derivasi fungsi profit* dan BOPO.

Kemudian data-data yang berhubungan dengan penelitian dikumpulkan. Data tersebut diperoleh dari neraca dan laporan laba rugi masing-masing Unit

Usaha Syariah untuk periode Maret 2005 sampai dengan Desember 2007. Data tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah, website Bank Indonesia, website bank-bank yang bersangkutan, dan perpustakaan Bank Indonesia.

Data tersebut kemudian dikonversi menjadi variabel *input* dan *output* yang telah ditentukan dengan metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA). Dengan menggunakan metode SFA akan dihitung nilai efisiensi setiap Unit Usaha Syariah dalam sampel. Sementara dari data Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional yang diperoleh, kemudian diukur efisiensi berdasarkan rasio keuangan BOPO, lalu dibandingkan nilainya untuk masing-masing Unit Usaha Syariah.

Perhitungan efisiensi bank dari sisi profit ini menggunakan metode *stochastic frontier analysis* (SFA) yang menghitung derivasi dari fungsi profit, yang diestimasi terlebih dahulu, dengan profit frontiernya. Metode SFA yang dikembangkan oleh Aigner, Lovell, Schmidt (1977) (dalam Astiyah et.al, hal.2,2005) ini bekerja dengan memungkinkan suatu uncontrollable shock pada fungsi profit dan telah dibuktikan keunggulannya dibandingkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Pada metode SFA, profit dari suatu bank dimodelkan untuk terdeviasi dari profit *efficient frontier*-nya akibat adanya *random noise* dan inefisiensi. Fungsi *alternative stochastic frontier* yang selanjutnya akan digunakan pada studi ini memiliki bentuk umum (log) berikut :

$$\ln(\pi_n + a) = f(\ln w_{j,n}, \ln y_{i,n}) + \varepsilon_n \quad (1.1)$$

dimana π_n merupakan total profit untuk bank n dan a merupakan konstanta agar profit tidak negatif sehingga dapat dijadikan natural logarithma, $w_{j,n}$ merupakan harga input j pada bank n, dan $y_{i,n}$ merupakan kuantitas output i pada bank n. Error term, ε_n dari kedua fungsi ini terdiri dari dua komponen.

$$\varepsilon_n = u_n + v_n \quad (1.2)$$

Komponen v_n merupakan *random error* pada bank n, adalah diasumsikan menjadi distribusi normal dan nilai dari error term dalam fungsi profit adalah sama dengan nol pada rata-rata. Sehingga komponen u_n yang merupakan inefisiensi didapat dari

distribusi normal $N(0, \sigma_u^2)$, namun memotong dibawah nol, sehingga diasumsikan u terdistribusi half-normal, $|N(0, \sigma_u^2)|$ (Hassan, 2005)

Selain metode SFA tersebut, rasio keuangan berupa BOPO dapat juga menghitung efisiensi Unit Usaha Syariah dari sisi efisiensi biaya. Rasio ini merupakan hasil dari pembagian Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional yang diperoleh Unit Usaha Syariah tersebut.

Dengan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) akan dihasilkan score dari tiap bank yang diteliti yang akan menunjukkan bank yang paling efisien pada tiap periode, sementara BOPO akan menghasilkan rasio bank dalam kondisi efisien. Setelah mengetahui bank yang paling efisien dan relatif efisien, maka dibandingkan secara keseluruhan antara efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Umum Pemerintah Nasional dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Swasta Nasional.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan terdiri dari lima bab. Pada masing-masing bab akan dibagi ke dalam beberapa sub bab, yang akan menguraikan secara lebih rinci masalah yang dibahas. Sistematika penulisan yang dipakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori atau Kajian Literatur

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, kesimpulan dari telaah literatur yang digunakan, dan menguraikan hasil penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi dan Data Penelitian

Bab ini berisi deskripsi penelitian, data yang digunakan, variabel penelitian, alat analisis yang digunakan serta alur penelitian.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab yang terakhir ini, akan ditarik kesimpulan dari keseluruhan penulisan tesis. Kemudian dilengkapi dengan saran-saran untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya dan juga kemungkinan *policy design* yang sebaiknya dilakukan.

